

## Pemerintah Kota Banjarmasin Teken Perjanjian Kerjasama Pajak Barang Jasa Tertentu dengan Perusahaan Listrik Negara



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/400989/pemkot-banjarmasin-teken-pks-pajak-barang-jasa-tertentu-dengan-pln>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pajak barang jasa tertentu atas tenaga listrik dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kerja sama terkait pajak pengelolaan penerangan jalan serta pembayaran rekening listrik," ujar Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman di Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, Pemkot Banjarmasin menandatangani PKS ini dengan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Banjarmasin pada hari ini di Aula Merdeka UP3 PLN Banjarmasin.

"Penandatanganan perihal ini dilakukan saya sendiri bersama Manajer UP3 PLN Banjarmasin Vicky Reandry Faradian," ujarnya.

Penandatanganan PKS ini dihadiri juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo serta jajaran lainnya.

Ikhsan menerangkan, bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah digelar bersama Wali kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Terlebih, ujarnya, peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak barang jasa tertentu telah diterbitkan sehingga program dapat dijalankan.

"Tentu dibutuhkan kerjasama dari teman-teman PLN dalam bentuk tagihan listrik, salah satunya ialah pajak penerangan jalan," ujarnya.

"Ini potensi yang bagus untuk Kota Banjarmasin, artinya ini upaya kita dengan beberapa aturan perundang-undangan, sehingga kita sudah bisa melaksanakan pemungutan terhadap pajak," ujarnya.

Manajer UP3 PLN Banjarmasin Vicky menyampaikan, bahwa PKS yang terjalin merupakan pertama di Kalimantan Selatan.

Diungkapkan dia, nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan selama tahun 2023 dari sektor ini berkisar di angka Rp65 miliar.

"Dengan sudah terbitnya Perda yang mengatur tentu hal ini bisa dilanjutkan, mengingat tahun 2023 lalu kontribusi daripada penerimaan pajak atas PBJ tenaga listrik sekitar Rp65 miliar dan ini kontribusi besar untuk kemajuan Kota Banjarmasin," kata Vicky.

Dia pun berharap sinergi yang telah terjalin antara Pemkot Banjarmasin dan PT PLN (Persero) dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari optimalisasi pelayanan.

"Semoga adanya PKS ini sinergi maupun kolaborasi yang selama ini sudah tersinergi akan makin sinergi demi pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelanggan PLN pada umumnya," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/400989/pemkot-banjarmasin-teken-pks-pajak-barang-jasa-tertentu-dengan-pln>, 8 Januari 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/08/pemko-banjarmasin-teken-pks-pajak-barang-jasa-tertentu-bersama-up3-pln-potensi-pad-rp-63-miliar>, 8 Januari 2024.

#### **Catatan:**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);  
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
  - a) PKB;
  - b) BBNKB;
  - c) PAB;
  - d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
  - a) PBB-P2;
  - b) BPHTB;
  - c) PBJT;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. Retribusi Jasa Umum;  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
    - a) pelayanankesehatan;
    - b) pelayanan kebersihan;
    - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    - d) pelayanan pasar; dan
    - e) pengendalian lalu lintas
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
  - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.